

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir)**

Oleh:

Sumiyati

Pembimbing : Zulbahridar Dan Devi Safitri

Faculty Economics of Riau University, Pekanbaru, Indonesia

E-mail : Sumiyat14@yahoo.com

ABSTRACT

***The Influence of Regional Financial Statements and Financial
Statement Accessibility on Financial Management Accountability(Study
in SKPD Rokan Hilir District)***

This study aims to examine the influence of regional financial statement and financial statement accessibility on financial management accountability. The populations in this study were officials echelon II dan III which consist of heads of SKPD, treasure SKPD finance department expenditures and receipts SKPD in district Rokan Hilir. The sampling technique using purposive sampling method. The data of this research using primary data directly through questionnaire and analyzed using SPSS 16. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach. The results of this study show regional financial statement and accessibility of financial management accountability effect on financial management.

Keyword: *regional financial statement, accessibility, and accountability*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002 :20).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, untuk

mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi, Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak disertai dengan transparansi maka keuangan daerah tersebut bisa jadi manipulasi atau kebohongan dan bahkan hanya karangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (PP No. 58 Tahun 2005). Sebagai salah satu konsekuensi, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mardiasmo, 2002)

Dalam kaitannya untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangannya secara baik dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses melihat pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menciptakan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan aksesibilitas yang komprehensif. Laporan

keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2009 sampai tahun 2013 masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan menurut beberapa penelitian sebelumnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan (Peggy Sande, 2013). Dalam penelitian ini penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas (Nordawan, 2010). Penyajian laporan keuangan menjadi penyebab akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimana penyajian laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran, naraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan atas

laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan PSAK No .1 (Revisi 2009).Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan PSAK NO.1(Revisi 2009). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus mengandung informasi yang relevan, jujur, dan terbuka kepada masyarakat. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimana semakin baik penyajian laporan keuangan akan semakin memperjelas pelaporan pemerintah (pertanggungjawaban) PP No.24 Tahun 2005. Hasil penelitian Peggy Sande (2013), Wahyuni Dkk (2014), Nurhayani (2013), dan Mustofa (2012) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh

Nasution (2009) menunjukkan hasil yang berbeda, penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan refleksi dari Peggy Sande (2013) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya variabel aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). MenurutMardiasmo (2009 :161) masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah, Semakin baik akses maka semakin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan daerah.Bambang Sutantono (2004) menyatakan bahwa aksesibilitas adalah hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya modal transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik

Shende dan Bennett (2004), sehingga aksesibilitas dalam pelaporan keuangan daerah merupakan salah satu upaya penguatan partisipasi publik. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan adalah sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Masalah lainnya adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi semakin baik laporan keuangan daerah makna berimplikasi semakin meningkatkan laporan keuangan daerah Wahyuni (2014). Dari paparan diatas maka peneliti akan menguji dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan 2) apakah pengaruh penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang peneliti ungkapkan adalah; 1) untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. 2) untuk membuktikan secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002:63). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun

2010). Menurut Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan adalah: (1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. (2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan. (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan. (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah

daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Tujuan utama penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus, 2002 dalam Rohman, 2009). Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perwujudan akuntabilitas publik belum tercapai sesuai harapan pengguna informasi. Faktor utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sande (2013) yang menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi

pemerintahan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2014),

Jadi dengan adanya penyajian laporan keuangan yang baik, yang memenuhi karakteristik laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. sehingga muncullah hipotesis h_1 : penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik (Shende dan Bennett, 2004) dalam (Mulyana, 2006). Sehingga aksesibilitas dalam pelaporan keuangan daerah merupakan salah satu upaya penguatan partisipasi publik.

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman,

2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan adalah sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Dalam Aksesibilitas ini terdapat beberapa indikator untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, diantaranya keterbukaan, kemudahan, dan accessible (Wahyuni, 2014).

Aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Menurut Mardiasmo (2009 :161) masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah, Semakin baik akses maka semakin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan daerah. Bambang Sutantono (2004) menyatakan bahwa aksesibilitas adalah hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya modal transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik Shende dan Bennett (2004), Sehingga aksesibilitas dalam pelaporan keuangan daerah merupakan salah

satu upaya penguatan partisipasi publik. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan adalah sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apakah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Mardiasmo, 2002).

Jadi dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan asset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sande, 2013), sehingga muncullah hipotesis H₂: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat setingkat eselon II, dan III yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan SKPD dan bendahara pengeluaran / penerimaan SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan, Staf Bagian Keuangan Dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan SKPD. Maka, jumlah responden pada penelitian ini adalah 120 orang, yaitu 30 SKPD Kabupaten Rokan Hilir dikalikan 4 orang yang menjadi responden di setiap SKPD.

Pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian.

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada Kepala SKPD dan Subbagian Keuangan SKPD di Kabupaten Rokan Hilir yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

a = konstanta

b₁, b₂, b₃ = koefisien regresi

- X₁ = penyajian laporan keuangan
 X₂ = aksesibilitas laporan keuangan daerah
 Y = transparansi dan akuntabilitas
 E = standar eror

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid-tidaknya suatu kuesioner sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat atau variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel Akuntabilitas pengelolaan keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung-jawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Halim 2002). Variabel ini diukur dengan Indikator pelaksanaan, perencanaan, tanggungjawab, pelaporan, dan pengawasan (Wahyuni, 2014). Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini diukur dengan instrument pertanyaan penelitian (Peggy Sande, 2013).

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan adalah penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan Yadiati (2007:63). Variabel penyajian laporan keuangan diukur dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 yaitu andal, tepat waktu, relevan, lengkap, dan dapat dibandingkan (PP No 71 Tahun 2010). Variabel penyajian laporan keuangan ini diukur dengan instrumen pertanyaan penelitian peggy sande (2013).

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Variabel aksesibilitas diukur dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) melalui media massa (Permendagri No.13 Tahun 2006) dan indikatornya adalah keterbukaan, kemudahan, dan accesible. Variabel aksesibilitas laporan keuangan ini diukur dengan instrumen pertanyaan penelitian dari peggy sande (2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas

laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam tabel descriptive statistics yang menunjukkan angka minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Table 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	93	20	39	29.91	3.286
Penyajian Laporan Keuangan	93	23	40	32.80	3.821
Aksesibilitas Laporan Keuangan	93	3	15	10.24	2.568
Valid N (listwise)	93				

Sumber : Data olahan SPSS 16

Penyajian laporan keuangan

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 23 nilai maksimum 40 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 32,80 dengan standar deviasi sebesar 3,821. Nilai rata-rata 32,80 menunjukkan bahwa besarnya penyajian laporan sebesar 32,80. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi penyajian laporan ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum 15 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 10,24 dengan standar deviasi sebesar 2,568. Nilai rata-rata 10,24 menunjukkan bahwa besarnya aksesibilitas sebesar 10,24. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi aksesibilitas ini menunjukkan bahwa

terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum 39 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,91 dengan standar deviasi sebesar 3,286. Nilai rata-rata 29,91 menunjukkan bahwa besarnya transparansi dan akuntabilitas sebesar 29,91. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi transparansi dan akuntabilitas ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Hasil Pengujian Kualitas Data Hasil Uji Validitas Data

Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pertanyaan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5% $df = n-2$ ($93-2$) = 91 $r_{tabel} = 0,203$.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Penyajian laporan keuangan (X_1)	0,847	0,6	Reliabel
Aksesibilitas (X_2)	0,649	0,6	Reliabel
Akuntabilitas (Y)	0,811	0,6	Reliabel

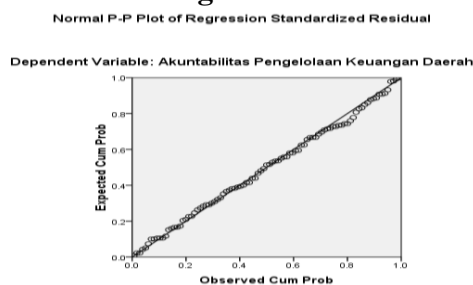
Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan

akuntabilitas antara lain 0,847, 0,649, 0,811. Dari semua nilai ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas Data

Gambar 1
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas dengan P-Plot



Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa data tersebar di sekitar garis diagonal (tidak terpencar dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji t dan Uji R^2 dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Nilai Tolerance dan VIF

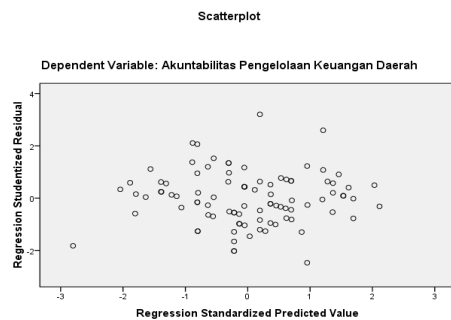
Model	Coefficients ^a		Kesimpulan
	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
Penyajian laporan keuangan	.991	1.009	Tidak terjadi multikolinearitas
Aksesibilitas	.991	1.009	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data olahan 2015

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

Hasil Uji Heterokedastisitas
Gambar 2
Hasil Pengujian Asumsi Heterokedastisitas dengan scatterplot



Sumber: Data olahan spss 16

Gambar 2 ini menunjukkan gambar hasil uji heterokedastisitas, dari gambar grafik *Scatterplot* di atas ini terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas karena titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Hasil Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Watson. Autokorelasi tidak terjadi apabila angka Durbin Watson berada antara -2 sampai dengan +2. Hasil Uji

Autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	Kesimpulan
1	,563	,317	,302	2,745	1,481	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data Olahanspss 16

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai d_{hitung} (Durbin Watson) terletak antara -2 dan $+2 = -2 < 1,481 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig	Kesimpulan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)						
1. Penyajian laporan keuangan	13,147 ,464	2,635 ,075	,540	4,990 6,168	,003 ,000	Hipotesis Diterima
1. Aksesibilitas	,151	,112	,118	2,135	,018	Hipotesis diterima

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 13,147 + 0,464X_1 + 0,151 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

X_1 : penyajian laporan keuangan

X_2 : aksesibilitas pengelolaan keuangan

Persamaan di atas memperlihatkan bahwa:

Tabel 6
Hasi uji koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,563	,317	,302	2,745	1,481

- Predictors: (Constant), Aksesibilitas, Penyajian laporan
- Dependent Variable: Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai R square (R^2) sebesar 0,317 dan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,302. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah sebesar 30,2%. Sedangkan sisanya 69,8% dijelaskan oleh variabel lain seperti Efektifitas pengelolaan keuangan daerah dan Akuntansi keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut

H_{01} : tidak ada pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

H_{a1} : ada pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Dari tabel 5 di atas dapat

dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,168 > 1,986$ dengan nilai signifikansi diperoleh adalah $0,000 < 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu: H_{a1} : Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Hasil pengujian yang menemukan hasil signifikan dikarenakan Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai

dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparansi dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Sande (2013). sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhayani (2013), yang mengemukakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Adapun hipotesis untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut

H_0 : tidak ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

H_a : ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Dari tabel 4.7 diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,135 > 1,986$ dengan nilai signifikan diperoleh sebesar $0,018 < 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu: H_a Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan

penyebab dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena kemudahan aksesibilitas menjadikan akuntabilitas terhadap laporan keuangan daerah tersebut. Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal sehingga dapat dikatakan bahwa dengan memberikan kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah Wahyuni (2014).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nahar (2012) yang menyatakan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tetapi bertolak belakang dengan Sastra (2013) yang menyimpulkan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Sastra (2013) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain : (1)

Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparansi dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhayani (2013) yang mengemukakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi memberikan kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nahar (2012) Hasil penelitian menyatakan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Tetapi bertolak belakang dengan Sastra (2013), yang menyimpulkan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Sastra(2013) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

(1) Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya SKPD yang terdapat di kabupaten Rokan Hilir saja namun diperluas menjadi seluruh SKPD yang terdapat di provinsi Riau. (2) Untuk SKPD yang ada di Kabupaten Rokan Hilir terutama pimpinan SKPD supaya bisa melakukan pembahasan atau sosialisasi dengan para staf bagian keuangan bahwa perlunya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan SKPD supaya masyarakat bisa mengakses atau mengetahui secara rinci laporan keuangan tersebut. (3) Dari nilai R^2 hasil perhitungan dapat diperoleh 30,2% sedangkan sisanya 69,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga pada penelitian yang akan datang perlu dikembangkan lagi dengan menggunakan variabel lainnya seperti Efektivitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.
- Bandariy, Himmah. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- 2014 : *Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir*
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Pernyataan standart akuntansi keuangan No.1. Dewan standar akuntansi keuangan. Jakarta
- Koestoer, Hendro. "Penduduk dan Aksesibilitas Kota: Persepektif Tata Ruang Lingkungan". <http://www.worldcat.org>. Diakses tanggal 1 februari 2014.
- Mustofa, iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah kota bandung. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal akuntansi pemerintah*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. *Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. USU
- Nurhayani, hani. 2013. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah kota bandung. *Jurnal akuntansi pemerintah*.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Vol.1. No 1. 2009.
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal akuntansi pemerintah*

- Sastra, yuni.2013. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah kota medan. *Jurnal akuntansi pemerintah*.
- Shukemi,2012. Pengaruh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah istimewa Yogyakarta *Jurnal akuntansi pemerintah*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*,Alfabeta,Bandung.
- Sumarsono, Hadi. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi*
- Wahyuni, Putu Sri,sulindawati dkk 2014.Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah kabupaten Bandung. *Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.